

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan nasional bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem pendidikan yang berakar yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pendidikan nasional mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak secara peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik/warga belajar agar menjadikan manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, beriman, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokrasi dan bertanggung jawab, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas), mengatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah memaparkan tentang keseluruhan mengenai pendidikan. Salah satunya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang pendidikan dan kebudayaan, dijelaskan bahwa: “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Adanya payung hukum yang telah ditetapkan, maka setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal inilah yang menjadi salah satu acuan kita dalam dunia pendidikan

Pendidikan Non Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik di lembaga maupun tidak. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Hal ini mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

Menurut Comb, (1973) (dalam Sudjana, 2010, hlm.21) mengemukakan bahwa:

Pendidikan Non Formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Penyelenggaraan pendidikan non formal (PNF) merupakan upaya dalam rangka mendukung perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat. Salah satu program dari Pendidikan Non Formal Program Keaksaraan Usaha mandiri.

Penyelenggaraan pendidikan di masyarakat yang dilakukan oleh para praktisi yang didorong oleh hasrat dan rasa pengabdian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Kesempatan pembelajaran ini diberikan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta untuk menumbuhkan hasrat dan partisipasi masyarakat dalam berwirausaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Prestasi belajar yaitu merupakan salahsatu tolok ukur yang paling utama untuk mengetahui bagaimna keberhasilan belajar seseorang. Hasil belajar yang dicapai siswa atau peserta didik dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal (Slameto, 2003). Penyebab utama kesulitan belajar adalah faktor internal yaitu diantaranya minat, bakat, motivasi, tingkat intelegensi, sedangkan penyebab problem belajar adalah faktor eksternal antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar peserta didik, maupun faktor dari lingkungan.

Program keaksaraan dasar dikenal dengan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional, sehingga secara istilah *fungsional* dalam keaksaraan, berkaitan erat dengan fungsi dan tujuan dilakukannya Proses pembelajaran di dalam program pendidikan keaksaraan, serta adanya jaminan bahwa hasil belajarnya benar-benar

bermanfaat atau fungsional bagi “peningkatan mutu dan taraf hidup” warga belajar dan masyarakatnya.

Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) merupakan lanjutan dari keaksaraan dasar yang dimaksudkan untuk memberikan penguatan keberaksaraan agar warga belajar yang sudah mengikuti (pasca program) pendidikan keaksaraan dasar tidak kembali buta aksara, dengan penekanan peningkatan keterampilan atau berusaha (kewirausahaan), sehingga dapat memiliki mata pencaharian dan penghasilan dalam rangka peningkatan taraf hidupnya. Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) merupakan kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan bagi warga belajar yang telah mengikuti dan atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar, melalui pembelajaran keterampilan usaha (kewirausahaan) yang dapat meningkatkan produktivitas warga belajar, baik secara perorangan maupun kelompok sehingga diharapkan dapat memiliki mata pencaharian dan penghasilan dalam rangka peningkatan taraf hidupnya. (didalam Juknis Program Keaksaraan Usaha Mandiri 2015)

Program Keaksaraan Usaha Mandiri ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mandiri dan mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki warga belajar, selain itu program ini juga bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan berwirausaha secara mandiri.

Teori ekonomi yang mendukung program Keaksaraan dengan penelitian yang dilakukan oleh Philips (1964) dengan dasar rancangan *expost factor*, yaitu ekonomi yang menunjukkan adanya pertumbuhan produktivitas sebagai dampak pendidikan. Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari pertumbuhan di bidang produksi di Negara berkembang. Adapun dampak program keaksaraan terhadap produktivitas potensi manusia, tergambar dalam penelitian kuasi eksperimental yang dihasilkan oleh Stanislav Strumlin (1965) yang menunjukkan bahwa seorang pekerja yang berpendidikan setahun di sekolah dasar memiliki pertumbuhan produktivitas sebesar 30%, sedangkan pekerja buta aksara yang dimagangkan di industri selama satu tahun hanya memiliki pertambahan produktivitas sebesar 12% peningkatan kualifikasi yang dihasilkan dari sekolah selama satu tahun rata-rata mempunyai 2,6 kali lebih besar dari [ada yang satu

tahun magang di perusahaan. Dengan demikian, efektivitas program keaksaraan ini dapat memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan ekonomi.

Pusat perhatian yang mendasar dalam bidang ekonomi yang dihadapi pemerintah yaitu bagaimana mengumpulkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai berbagai tujuan yang beraneka ragam, bahkan mungkin bertentangan satu sama lain.

Kewirausahaan yaitu kemampuan seorang dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik secara materil, intelektual, waktu dan kemampuan kreativitas untuk menghasilkan satu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Sehingga perlu adanya pembinaan masyarakat dalam pengembangan kewirausahaanya oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berperan dalam bidang pembangunan dan pengabdian masyarakat. Lembaga pendidikan non formal terdiri dari lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat adalah tempat atau panti pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi pedesaan atau perkotaan untuk menggerakkan pembangunan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya.

Alma (2004) mengemukakan bahwa wirausaha atau entrepreneur: Orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Jadi seorang wirausaha atau entrepreneur tidak selalu seorang pedagang atau seorang manager; ia adalah orang unik yang berpembawaan pengambil resiko dan yang memperkenalkan produk-produk inovatif dan teknologi baru kedalam perekonomian.

Keberadaan PKBM sesuai dengan yang tercantum pada UU No. 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 4 yang berbunyi sebagai salah satu satuan pendidikan non formal. PKBM merupakan sarana untuk mengintensipkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang pelaksanaannya dipusatkan di suatu tempat yang dimiliki dan dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat. Atas dasar itu PKBM bersifat fleksibel, karena ada peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja sesuai yang masyarakat butuhkan. Juga bersifat netral karena tidak menggunakan atribut pemerintah. Secara alami PKBM telah ada sejak manusia mengenal kegiatan belajar bersama, sedangkan secara

kelembagaan PKBM dirintis dan disosialisasikan di Indonesia sejak bulan Agustus 1988.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yaitu suatu wadah berbagai pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Pembentukan PKBM dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber potensi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan terutama jumlah kelompok sasaran dan jenis usaha. Secara umum PKBM dibentuk dengan tujuan untuk memperluas kesempatan warga masyarakat khususnya yang tidak mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan mencari nafkah.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Winaya Bhakti merasa terpenggil dalam penanggulangan pemberantasan buta aksara dan mengembangkan kewirausahaan masyarakat. Kesadaran dan tanggung jawab pusat kegiatan belajar masyarakat terhadap pemberantasan buta aksara dan pengembangan kewirausahaan masyarakat ditunjukkan melalui realisasi visi dari pusat kegiatan masyarakat, untuk menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan rendahnya tingkat kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam bidang pendidikan sehingga berdampak pada lemahnya perekonomian masyarakat.

Melihat keadaan di lapangan berkaitan erat dengan permasalahan masyarakat buta aksara dan rendahnya perekonomian masyarakat yang banyak menimbulkan dampak tidak baik dalam keberlangsungan pembangunan pendidikan dan ekonomi, dalam ruang lingkup khusus ketidak mampuan membaca, menulis dan berhitung ini menyebabkan ketidak optimalan dalam mengexploitasi potensi yang dimiliki setiap individu yang di klasifikasikan buta aksara. Mereka memiliki keterbatasan dalam dinamika sosial, teknologi dan informasi. Dalam ruang lingkup umum buta aksaraan menyebabkan ketertinggalan bangsa ini dalam mempersiapkan diri menghadapi era globalisasi yang sarat dengan kompetisi, sehingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Winaya Bhakti ini berinisiatif untuk menyelenggarakan dan merancang program Keaksaraan Usaha Mandiri sebagai wadah untuk menyalurkan kemampuan, kreatifitas masyarakat

dan menuntun masyarakat untuk berwawasan tinggi dan mandiri dalam berwirausaha.

Penyelenggaraan Program Keaksaraan Usaha Mandiri ini sudah berjalan sejak Tahun 2010 sasaran dari program ini adalah masyarakat usia produktif yakni 15-59, jumlah warga belajar yang dimiliki Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Winaya Bhakti dari program Keaksaraan Usaha Mandiri ini sekitar 420 warga belajar, yang dibagi menjadi 42 kelompok belajar. Proses pelaksanaan program Keaksaraan usaha mandiri ini berjalan selama 3 bulan dan dilaksanakan oleh 20 tutor.

Penilaian hasil belajar yang dilakukan tutor yaitu dengan mengukur ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan oleh warga belajar, yang meliputi peningkatan pengetahuan calistung, mendengar, sikap dan keterampilan atau kecakapan hidup. warga belajar akan dikatakan berhasil apabila warga belajar mampu menerapkan atau mengaplikasikan hasil belajarnya.

Setelah proses kegiatan pembelajaran program Keaksaraan Usaha Mandiri selesai, maka tugas selanjutnya pengelola dan tutor adalah melakukan pendampingan. Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan warga belajar agar dapat menerapkan atau mengaplikasikan hasil belajar yang diperoleh dari pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok.

Tujuan pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri yaitu meningkatkan kemampuan usaha mandiri dan mengaktualisasi berbagai potensi yang ada di daerah setempat. Dengan demikian, pengelola dan tutor mengembangkan potensi yang ada di daerah setempat seperti pembuatan sale pisang, opak, kripik pisang dan singkong tales (lado). Dengan harapan warga belajar bisa mengembangkan kewirausahaan dengan pengelolaan yang baik contohnya dalam bentuk pembukuan antara pendapatan dan pengeluaran dapat mereka lakukan dengan mandiri. namun pada kenyataan dilapangan dari 420 warga belajar yang ada hanya sebaaian kecil warga belajar yang mengaplikasikan hasil belajarnya di karenakan faktor kurangnya kepercayaan diri dari warga belajar untuk berwirausaha dan modal usaha yang tidak ada yang menyebabkan hasil pembelajaran dari program Keaksaraan Usaha Mandiri ini tidak di aplikasikan.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa peran aktif pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia sangat perlu diperhatikan, salah satunya melalui pendidikan non formal. Masih kurangnya kepercayaan diri dari sebagian warga belajar sehingga hasil belajar dari program keaksaraan usaha mandiri ini kurang diaplikasikan hasil pembelajarannya, sehingga Penting proses pendampingan yang dilaksanakan oleh pengelola dalam keberlangsungan kewirausahaan masyarakat. Seiring dengan permasalahan yang ada, maka dari itu peneliti mencoba mengangkat judul: “Dampak Hasil Belajar Program Keaksaraan Usaha Mandiri terhadap Minat Berwirausaha Masyarakat”

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang menonjol dalam program Keaksaraan Usaha Mandiri ini terdapat pada pengembangan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi lokal setempat dalam bidang makanan di antaranya pembuatan sale pisang, kripik pisang , kripik singkong (lado) dan opak yang dilaksanakan oleh sebagian warga belajar di PKBM Winaya Bhakti.
2. Warga belajar yang mengikuti program Keaksaraan Usaha Mandiri ini ada 420 warga belajar yang dibagi menjadi 42 kelompok, warga belajar mayoritas bekerja sebagai pekerja petani, ibu rumah tangga dan pekerja serabutan
3. Belum maksimalnya pemanfaatan sumberdaya yang sudah tersedia sebagai penunjang lahan berwirausaha masyarakat, sehingga lembaga perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam pemanfaatannya.
4. Tebatasnya kemampuan tutor dalam menginovasi dan mendistribusikan hasil olahan warga belajar yng menyebabkan warga belajar memilih untuk bekerja serabutan.
5. Kurangnya pendampingan dari tutor kepada warga belajar yang telah selesai mengikuti program Keaksaraan usaha Mandiri sehingga keberlanjutan dari kewirausahaan masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya untuk lebih menajamkan fokus kajian penelitian maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil belajar program keaksaraan usaha mandiri di PKBM Winaya Bhakti?
2. Bagaimana minat berwirausaha warga belajar program keaksaraan usaha mandiri?
3. Bagaimana dampak dari hasil belajar program keaksaraan usaha mandiri terhadap minat berwirausaha?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas tujuan penelitian yaitu

1. Untuk mengetahui hasil belajar program keaksaraan usaha mandiri di PKBM Winaya Bhakti
2. Untuk mengetahui minat berwirausaha warga belajar program keaksaraan usaha mandiri?
3. Untuk mengetahui dampak dari hasil belajar program keaksaraan usaha mandiri terhadap minat berwirausaha.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak yang terkait, diantaranya adapun manfaat penelitian ini diantaranya :

1. Secara Teoritis

Memberikan manfaat dan sumbangan ilmu pendidikan khususnya dibidang pendidikan keaksaraan dan kewirausahaanDiharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan berpikir khususnya bagi penulis umumnya bagi pihak lain yang memerlukannya

2. Secara Praktisi

Sebagai bahan untuk mengembangkan lebih lanjut tentang program yang dilakukan oleh PKBM Winaya Bhakti dan bagi penyelenggara program sehingga penelitian ini dapat dijadikan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan penyelenggaraan programa Keaksaraan Usaha Mandiri terhadap perubahan pola pikir masyarakat dan prilaku serta kemandirian berwirausaha.



## **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah UPI (2014:20) sistematika yang dipergunakan dalam penulisan laporan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka, berfungsi sebagai landasan teoritis dalam menyusun pertanyaan penelitian yang mencangkup tentang konsep Hasil Belajar, konsep Keaksaraan Usaha Mandiri, konsep Kewirausahaan, konsep kesejahteraan, konsep dasar ekonomi kemasyarakatan, dan konsep dasar pendapatan masyarakat.

BAB III : Metode Penelitian, berisi penjabaran yang rinci mengenai desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data penelitian..

BAB IV : Temuan dan Pembahasan, terdiri atas dua hal utama yakni pengolahan atau analisis data serta pembahasan atau analisis temuan.

BAB V : Simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyatakan mengenai hasil penelitian.